

DINAMIKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN: PENGARUH UPAH MINIMUM, TINGKAT PENDIDIKAN DAN KEPADATAN PENDUDUK PERKOTAAN

Vianisa Nabila¹⁾, Handy Nugraha²⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: b300220255@student.ums.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: hn658@ums.ac.id

Abstract

Women's participation in the labor force remains a major obstacle in the development of the labor market. In Indonesia, female labor force participation is still below male labor force participation. The purpose of this study is to investigate how the level of female labor force participation in Central Java is influenced by the regency minimum wage, women's education level, and urban population density between 2019 and 2023. The type of data in this study is secondary data from the Badan Pusat Statistik (BPS). Using panel data regression analysis with the Fixed Effects Model (FEM), this study employs a quantitative approach. The results show that female labor force participation in Central Java is positively and significantly influenced by the minimum wage, which means that if the district minimum wage increases, the participation rate of female labor in the area will also rise. However, the level of women's education and urban population density do not seem to have a significant impact on female labor force participation in Central Java. There is a need for government intervention by providing equal access to education and employment opportunities and aligning higher education levels with industry needs.

Keywords: Female Labor Force Participation Rate, District Minimum Wage, Education, Urban Population Destiny, Central Java

1. PENDAHULUAN

Tenaga kerja berperan penting dalam menentukan keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ([Putri & Woyanti, 2025](#)). Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan output, tetapi juga terhadap distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan ([Marbun & Muchtolifah, 2023](#)). Dalam perspektif pembangunan inklusif, keberadaan tenaga kerja yang produktif dan dapat terserap secara optimal menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi ([Anggitaningrum et al., 2024](#)). Secara makro, tenaga kerja juga menjadi indikator utama stabilitas sosial ekonomi. Negara dengan tingkat partisipasi tenaga kerja yang tinggi, cenderung memiliki tingkat pengangguran yang rendah dan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di negara tersebut ([Adianita et al., 2024](#); [Nilasari & Amelia, 2022](#)).

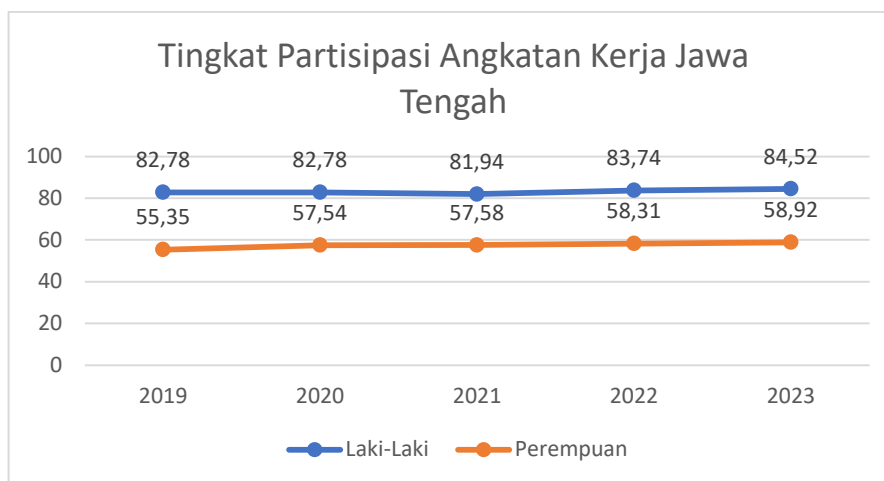
Salah satu indikator utama yang mencerminkan kondisi dan perkembangan tenaga kerja di Indonesia adalah data TPAK. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator yang dipergunakan dalam menghitung persentase penduduk usia kerja yang berperan aktif dalam perekonomian suatu negara ([Haryanti, 2022](#)). Sedangkan menurut [Badan Pusat Statistik \(2020\)](#)

TPAK ialah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik sedang bekerja atau berupaya mendapatkan pekerjaan, proporsi ini juga dapat mengukur seberapa besar pasokan tenaga kerja yang bersedia terlibat pada produksi barang dan jasa. Indikator TPAK digunakan secara luas untuk mengevaluasi kinerja pasar tenaga kerja, efektivitas kebijakan ketenagakerjaan, dan tingkat inklusivitas ekonomi. Dalam konteks pembangunan, peningkatan TPAK menunjukkan peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia dan pengembangan modal manusia, yang berimplikasi langsung terhadap peningkatan produktivitas nasional dan pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara ([Muhammad Azam, 2024](#)). TPAK dapat diukur berdasarkan jenis kelamin, di mana salah satu aspek pentingnya adalah TPAK perempuan.

TPAK perempuan merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana perempuan berperan dalam pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia. Partisipasi perempuan sebagai angkatan kerja dapat memperluas pasar tenaga kerja, kemudian juga produktivitas yang semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang semakin merata ([Murialti et al., 2024](#)). Keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, tetapi juga mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ([Bayumi et al., 2022](#)). Salah satu tujuan mengapa perempuan perlu berperan aktif dalam pasar tenaga kerja yaitu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi perempuan agar tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan laki-laki. Pada penelitian yang dilakukan [Putri et al. \(2025\)](#) peran perempuan dalam pasar tenaga kerja masih rendah, terjadi karena adanya pandangan bahwa laki-laki memiliki tugas utama mencari nafkah sedangkan perempuan dianggap tugas utamanya berada di rumah untuk mengurus rumah tangga.

Di Indonesia, partisipasi tenaga kerja perempuan mengindikasikan tren yang relatif stabil namun masih berada di bawah partisipasi tenaga kerja laki-laki. Data dari [World Bank \(2024\)](#) mencatat bahwa TPAK perempuan Indonesia berada pada angka 54,7 persen, jauh di bawah rata-rata TPAK laki-laki yang mencapai sekitar 83,2 persen. Sampai saat ini TPAK perempuan di berbagai wilayah masih menjadi salah satu masalah kependudukan. Namun pada dasarnya perempuan memiliki peran penting dalam perekonomian yaitu sebagai penyumbang angkatan kerja yang besar dari waktu ke waktu ([Azizah Siregar et al., 2024](#)). Dalam penelitian [Panjaitan et al. \(2025\)](#) hubungan antara partisipasi angkatan kerja perempuan dengan perekonomian di Indonesia lebih kompleks yaitu mencerminkan perubahan aktivitas ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan mempersempit kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Setiap wilayah memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda yang memengaruhi sejauh mana penduduknya terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti halnya di tingkat provinsi. Provinsi Jawa Tengah mempunyai luas wilayah sekitar 32.800 km² yang terbagi menjadi 35 wilayah, meliputi 29 kabupaten dan 6 kota. TPAK perempuan di Jawa Tengah meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2023 TPAK perempuan meningkat sebesar 0,61 persen dari tahun sebelumnya ([Badan Pusat Statistik, 2023](#)).



Gambar 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berdasarkan jenis kelamin di Jawa Tengah 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2025)

Berdasarkan Gambar 1, TPAK perempuan pada tahun 2019-2023 di Jawa Tengah berada pada kisaran angka 50 persen dan sangat timpang dengan angka TPAK laki-laki yang berada pada kisaran 80 persen. Persentase tersebut membuktikan partisipasi perempuan masih rendah dibandingkan laki-laki. Pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, semakin besar jumlah angkatan kerja yang dibarengi dengan peningkatan TPAK maka penduduk yang mencari pekerjaan juga meningkat ([Murialti et al., 2024](#)). TPAK perempuan mampu dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, upah minimum serta tingkat pendidikan yang pada akhirnya dapat menyebabkan pengaruh pada keputusan perempuan untuk turut terlibat dalam angkatan kerja ([Fathiyah et al., 2025](#)).

Kesenjangan partisipasi tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan hingga sekarang ini masih menjadi tantangan besar pada pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan meningkat, tetapi ketimpangan dalam kesempatan kerja tetap membatasi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh di pasar tenaga kerja ([Shintiya et al., 2025](#)). Rendahnya partisipasi perempuan juga berkaitan dengan keterbatasan dalam akses terhadap pelatihan, kurangnya fleksibilitas jam kerja, dan ketimpangan upah. Di banyak wilayah masih terdapat budaya patriaki yang membuat perempuan dipandang lebih rendah dibanding dengan laki-laki, sehingga membuat akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan terbatas ([Ayu Gusriya et al., 2025](#)). Penelitian [Al-Maisyaroh & Nugraha \(2025\)](#) menunjukkan bahwa budaya patriaki menyebabkan perempuan cenderung merasa lebih bahagia ketika tidak setara, karena apabila perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki maka perempuan akan terbebani dengan dua peran yaitu bekerja dan mengurus rumah tangga. Dalam konteks geografis, TPAK perempuan cenderung lebih rendah di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan, disebabkan oleh rendahnya permintaan tenaga kerja formal dan dominasi sektor informal. Seperti pada penelitian [Huzaimi & Arisetyawan \(2023\)](#) yang menemukan bahwa wilayah tempat tinggal berpengaruh terhadap partisipasi perempuan pada

sektor informal, kondisi di pedesaan yang terbatas membuat perempuan sulit mengakses pekerjaan yang layak di sektor formal.

Hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan kondisi pasar tenaga kerja tidak dapat terlepas dari faktor ekonomi, salah satunya adalah upah minimum kabupaten yang berpotensi memengaruhi daya tarik pasar tenaga kerja formal bagi perempuan. Kebijakan upah minimum kabupaten (UMK) dibuat untuk melindungi kesejahteraan pekerja, memberikan kehidupan yang layak dan mendorong peningkatan produktivitas ([Nurhasanah et al., 2025](#)). Peningkatan upah dapat memberikan insentif bagi perempuan untuk masuk ke pasar tenaga kerja, terutama di sektor formal, karena potensi pendapatan yang lebih tinggi ([Ahmaddien & Sa'dia, 2020](#)). Namun upah minimum yang ditetapkan pemerintah dapat menjadi pendorong ataupun penghambat bagi angkatan kerja perempuan untuk memutuskan bekerja atau tidak, dilihat dari apakah upah tersebut layak untuk memenuhi kebutuhan hidup ([Azizah et al., 2024](#)). Di Jawa Tengah, perbedaan UMK antar kabupaten memberikan tantangan tersendiri dalam meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan, terutama di daerah yang memiliki upah minimum rendah. Semakin tingginya tingkat upah yang ditawarkan di pasar tenaga kerja, maka semakin banyak orang yang memutuskan untuk bekerja dan sebaliknya, jika tingkat upah rendah maka banyaknya individu yang memutuskan untuk tidak memiliki pekerjaan ([Agustina, 2017](#)). Penelitian oleh [Murialti et al. \(2022\)](#) menyatakan bahwasanya upah minimum menyebabkan pengaruh positif serta signifikan pada TPAK perempuan. Berbanding terbalik dengan penelitian oleh [Fathiyah et al. \(2025\)](#), yang mengungkapkan bahwasanya upah minimum tidak menyebabkan pengaruh signifikan pada TPAK perempuan. Berdasarkan penjelasan berbagai literatur terkait dan hasil penelitian terdahulu [Agustina \(2017\)](#); [Borgan Bonerri et al. \(2018\)](#); [Murialti et al. \(2022\)](#), (2024); [Norhikmah et al. \(2022\)](#) maka hipotesis pengaruh UMK pada TPAK perempuan dalam penelitian ini yakni seperti berikut:

H1: Peningkatan UMK dapat meningkatkan TPAK perempuan

Selain dipengaruhi oleh besaran upah minimum, partisipasi angkatan kerja perempuan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang berhubungan langsung dengan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Tingkat pendidikan merupakan determinan utama partisipasi wanita dalam pasar tenaga kerja ([Hasian & Harmadi, 2024](#)). Pendidikan dapat meningkatkan keterampilan, mobilitas sosial, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi, sehingga membuka peluang kerja di sektor formal yang lebih produktif. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi notabene berpeluang lebih besar untuk bergabung ke dalam angkatan kerja. Pada studi [Audilla & Rachmawati \(2025\)](#) mengungkapkan bahwasanya tingkat pendidikan perempuan yang tinggi dapat meningkatkan TPAK perempuan seiring dengan mudahnya akses terhadap pekerjaan. Pendidikan membuka peluang bagi perempuan untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik serta menaikkan tingkat kualitas hidup mereka. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan waktu tempuh pendidikan yang lebih lama akan berdampak pada jenis pekerjaan dan upah yang didapatkan, jika pendidikan rendah maka jenis pekerjaan dan upah yang didapat juga akan lebih rendah, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan membuat seorang pekerja lebih mudah berbaur dalam lingkungan pekerjaannya ([Borgan Bonerri et al, 2018](#)). Namun, meskipun pendidikan perempuan telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir, masih ada ketimpangan dalam akses pendidikan dan keterampilan yang dapat

memengaruhi partisipasi mereka di pasar tenaga kerja, terutama di daerah pedesaan yang lebih terisolasi. Pada riset dari [Norhikmah et al. \(2022\)](#) dan [Ariansyah & Satria \(2024\)](#) mengungkapkan bahwasanya pendidikan berpengaruh signifikan pada TPAK perempuan. Berbeda dengan riset dari [Murialti et al. \(2024\)](#), yang mengungkapkan bahwasanya tingkat pendidikan menyebabkan pengaruh negatif dan tidak signifikan pada TPAK perempuan. Berdasarkan penjelasan berbagai literatur terkait dan hasil penelitian terdahulu [Ariansyah & Satria \(2024\)](#); [Haryanti \(2022\)](#); [Murialti et al. \(2022\)](#); [Norhikmah et al. \(2022\)](#) maka hipotesis pengaruh tingkat pendidikan pada TPAK perempuan dalam riset ini yakni seperti berikut:

H2: Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan

Kepadatan penduduk perkotaan merupakan faktor baru yang diduga berpengaruh pada partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Daerah dengan kepadatan tinggi umumnya memiliki akses ekonomi yang lebih luas, kesempatan kerja lebih beragam, serta infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi produktif ([Yenny et al. 2025](#)). Namun, kepadatan yang berlebihan juga dapat menyebabkan kemacetan, biaya hidup tinggi, dan tekanan sosial yang diduga dapat menurunkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Di wilayah perkotaan, biasanya terdapat lebih banyak peluang kerja, baik di sektor formal atau informal, yang dapat menarik wanita untuk turut terlibat di pasar kerja. Namun, kondisi ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi lainnya, seperti budaya kerja, infrastruktur yang tersedia, dan kebijakan pemerintah setempat dalam memberikan dukungan terhadap perempuan di dunia kerja. Pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan dapat memengaruhi struktur ekonomi dan ketersediaan peluang kerja. Dalam penelitian [Rusydhan & Wijaya \(2024\)](#) menunjukkan bahwa kepadatan penduduk yang tinggi dalam wilayah tertentu dapat menekan kemampuan pasar tenaga kerja untuk menyerap tenaga kerja tambahan, yang berisiko meningkatkan pengangguran. Semakin padat penduduk harus diikuti dengan peningkatan faktor produksi agar tenaga kerja tersalurkan untuk memenuhi permintaan produksi ([Agung & Darsana, 2020](#)). Namun pada kenyataannya pertumbuhan penduduk yang semakin besar belum diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai. Berdasarkan penjelasan berbagai literatur terkait, maka hipotesis pengaruh kepadatan penduduk perkotaan terhadap TPAK perempuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Kepadatan penduduk perkotaan dapat menurunkan TPAK perempuan

Sampai saat ini, penelitian yang mengaitkan kepadatan penduduk perkotaan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan belum pernah dilakukan, khususnya di Jawa Tengah. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada relasi tingkat upah, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketenagakerjaan, serta tanpa membedakan dimensi gender. Seperti pada penelitian [Borgan Bonerri et al. \(2018\)](#) yang menganalisis dampak pendidikan dan upah terhadap TPAK di Kota Manado dan penelitian [Fathiyah et al. \(2025\)](#) yang menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi dan tingkat pendidikan pada TPAK di Provinsi Jambi. Selain itu, ada perbedaan atau ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian terkait TPAK. Dengan begitu, riset ini penting untuk dilaksanakan supaya dapat menganalisis bagaimana hubungan kepadatan penduduk perkotaan memengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja dan justifikasi terhadap faktor-faktor penentu TPAK yang masih inkonsistensi.

Penelitian ini bertujuan dalam rangka mengidentifikasi pengaruh UMK, tingkat pendidikan perempuan, dan kepadatan penduduk perkotaan pada TPAK perempuan di Jawa Tengah tahun

2019-2023. Hasil penelitian diharapkan berkontribusi pada pengembangan kebijakan ketenagakerjaan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*), serta mendorong peningkatan partisipasi ekonomi perempuan dalam pembangunan nasional. Di sisi lain, penelitian ini harapannya menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang intervensi sosial ekonomi yang inklusif dan berkeadilan gender, serta dalam bidang akademik menjadi justifikasi terhadap faktor-faktor penentu TPAK.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel pada penelitian ini meliputi Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) Perempuan, Upah Minimum Kabupaten, Tingkat Pendidikan Perempuan, dan Kepadatan Penduduk Perkotaan. Rincian data variabel-variabel dalam studi ini diindikasikan pada Tabel 1.

“Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Data	Sumber
TPAK Perempuan	Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) Perempuan (persen)	BPS
Upah Minimum Kabupaten	Upah Minimum Kabupaten (rupiah)	BPS
Tingkat Pendidikan Perempuan	Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (tahun)	BPS
Kepadatan Penduduk Perkotaan	Kepadatan Penduduk Perkotaan (jiwa/km ²)	BPS”

Data yang dipergunakan pada studi ini adalah data panel yaitu gabungan data *cross section* dan *time series* dengan alat analisis yang dipergunakan yaitu Eviews. Pada studi ini, data *cross section* ialah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sementara data *time series* yakni tahun 2019-2023. Model ekonometrika penelitian ini yakni seperti di bawah ini:

$$TPAKP_{it} = \beta_0 + \beta_1 UMK_{it} + \beta_2 RLSP_{it} + \beta_3 KPP_{it} + \varepsilon_{it}$$

di mana:

“TPAKP : Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan, %

UMK : Upah Minimum Kabupaten, Rupiah

RLSP : Rata-rata Lama Sekolah, Tahun

KPP : Kepadatan Penduduk Perkotaan, Jiwa/km²

β_0 : Konstanta

β_1 : Koefisien Upah Minimum Kabupaten

β_2 : Koefisien Rata-rata Lama Sekolah

- β_3 : Koefisien Kepadatan Penduduk Perkotaan
 ε : Residual
 i : 1-35 (data *cross section* kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)
 t : 1-5 (data *time series* tahun 2019-2023)

Metode analisis yang diterapkan pada riset ini yaitu regresi data panel. Proses analisis dimulai dengan menentukan model terbaik dan paling sesuai, dengan mempertimbangkan tiga pendekatan estimasi yaitu *Fixed Effects Model* (FEM), *Common Effects Model* (CEM), dan *Random Effects Model* (REM). Pemilihan model yang paling sesuai bertujuan untuk mengidentifikasi model yang memberikan estimasi paling akurat terhadap data panel. Langkah pertama dilakukan melalui Uji Chow, yang berfungsi untuk membandingkan model CEM dengan FEM. Berikutnya, dilaksanakan Uji Hausman guna untuk membandingkan model FEM dan REM. Pada Uji Chow, jika nilai probabilitas F-statistik $< \alpha$, maka H_0 ditolak, yang menandakan bahwa FEM lebih layak digunakan dibandingkan CEM, dan sebaliknya. Sedangkan pada Uji Hausman, jika probabilitas $\chi^2 < \alpha$, maka H_0 juga ditolak, yang berarti FEM merupakan model yang lebih tepat dibanding dengan REM, dan sebaliknya. Apabila hasil kedua uji tersebut tidak konsisten, maka perlu dilaksanakan satu uji lagi yakni Uji Lagrange Multiplier untuk memilih antara CEM dan REM. Dalam Uji Lagrange Multiplier, jika probabilitas $\chi^2 < \alpha$, maka H_0 ditolak, dengan demikian REM ialah model yang lebih tepat dipergunakan dibanding dengan CEM dan sebaliknya.

Setelah diperoleh model terbaik yang paling tepat untuk digunakan, lalu perlu dilakukan uji F untuk melihat apakah variabel independen secara simultan menyebabkan pengaruh variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) uji F adalah UMK, Tingkat Pendidikan Perempuan, dan Kepadatan Penduduk Perkotaan secara simultan tidak menyebabkan pengaruh pada Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) Perempuan. Adapun hipotesis alternatif (H_A) uji F adalah UMK, Tingkat Pendidikan Perempuan, dan Kepadatan Penduduk Perkotaan secara simultan menyebabkan pengaruh pada Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) Perempuan. H_0 akan ditolak apabila probabilitas F -statistik $< \alpha$.

Setelah dilakukan uji F dan hasilnya variabel tidak terikat secara simultan menyebabkan pengaruh pada variabel terikat, kemudian perlu dilaksanakan uji asumsi klasik yakni uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolinieritas dilakukan untuk memeriksa apakah antar variabel tidak terikat satu dengan variabel lainnya saling berhubungan dengan melihat nilai VIF, apabila $VIF < 10$ maka model bebas dari masalah multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas dilaksanakan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi *error* atau ketidaksamaan varian variabel, jika *Probabilitas Chi-Square* $> \alpha$ maka model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Analisis data pada studi ini dilaksanakan melalui penerapan uji t . Uji tersebut dipergunakan dalam mengidentifikasi sejauh mana setiap variabel tidak terikat memiliki pengaruh pada variabel terikat, dengan asumsi bahwa variabel tidak terikat yang lain tetap konstan. Hipotesis nol (H_0) pada uji t untuk setiap model mengungkapkan bahwasanya $\beta_i = 0$ ($i = 1-3$), yang mengindikasikan bahwa Upah Minimum Kabupaten, Tingkat Pendidikan Perempuan, serta

Kepadatan Penduduk Perkotaan tidak menyebabkan pengaruh terhadap TPAK Perempuan secara parsial. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_a) menetapkan bahwa $\beta_i < 0$ ($i = 1-3$), yang artinya ketiga variabel tersebut Upah Minimum Kabupaten, Tingkat Pendidikan Perempuan, dan Kepadatan Penduduk Perkotaan masing-masing menyebabkan pengaruh negatif pada TPAK Perempuan secara parsial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi pada model regresi data panel dilaksanakan dengan tiga metode, yakni CEM, FEM, dan REM. Hasil estimasi model data panel tertera dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Pemilihan Model

Uji Model	Probabilitas <i>Chi-square</i>	Model Terbaik
Uji Chow	0,000	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	0,038	<i>Fixed Effect Model</i>

Merujuk pada uji pemilihan model pada Tabel 2, tertera bahwasanya hasil probabilitas *chi-square* dari uji Chow adalah sejumlah $0,000 < \alpha$ (0,01). Dengan demikian, H_0 ditolak, yang artinya *Fixed Effect Model* (FEM) ialah model terbaik yang akan dipergunakan untuk mengestimasi data panel. Hasil Uji Hausman mengindikasikan probabilitas *chi-square* sejumlah $0,038 < \alpha$ (0,1), dengan demikian H_0 ditolak, yang artinya *Fixed Effect Model* (FEM) ialah model yang lebih tepat dipergunakan.

Tabel 3. Hasil Regresi FEM

$TPAKP_{it} = 48,336 + 0,000UMK_{it} * -1,679RLSP_{it} - 0,001KPP_{it}$
$R^2 = 0,772$; $F\text{-stat} = 12,554$; Prob. $F\text{-stat} = 0,000$
Keterangan: *koefisien signifikan pada α 0,01; **koefisien signifikan pada α 0,05; ***koefisien signifikan pada α 0,1

Merujuk pada hasil yang tertera dalam Tabel 3, didapati nilai probabilitas F-statistik sejumlah 0,000 yang kurang dari tingkat signifikansi α (0,01). Hal ini mengindikasikan bahwasanya H_0 ditolak, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa variabel UMK, Tingkat Pendidikan Perempuan, dan Kepadatan Penduduk Perkotaan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap TPAK Perempuan di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023. Nilai koefisien determinasi (R^2) sejumlah 0,772 menjadi indikasi bahwasanya 77,2% variasi dalam TPAK Perempuan dapat diuraikan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan 22,8% sisanya mendapat pengaruh dari faktor lain yang tidak termasuk dalam model estimasi. Selain itu, Tabel 3 juga memperlihatkan bahwa Tingkat Pendidikan Perempuan serta Kepadatan Penduduk Perkotaan menyebabkan pengaruh negatif pada TPAK perempuan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu yang sama.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Variance Inflation Factor (VIF)
UMK	3,586432
RLSP	3,652249
KPP	1,037299

Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa semua variabel tidak terikat dalam model mempunyai nilai VIF di bawah 10. Sehingga, kesimpulannya adalah tidak terdapat indikasi multikolinieritas yang berarti, atau dengan kata lain, hubungan antarvariabel bebas dalam model ini bersifat linier secara signifikan. Sehingga, variabel-variabel yang dipergunakan pada penelitian ini dinyatakan layak dipergunakan.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Probabilitas Chi-Square
UMK	0,2439
RLSP	0,9440
KPP	0,6918

Hasil uji heteroskedastisitas yaitu menunjukan *Probabilitas Chi-Square* $> \alpha$, yaitu variabel UMK $0,2439 > 0,1$; variabel RLSP $0,9440 > 0,1$; dan variabel KPP $0,6918 > 0,1$ maka model regresi ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji *t*

Variabel	Koefisien	Prob. <i>t</i>	Kesimpulan
UMK	0,0000129	0,0002*	β_1 signifikan pada α 0,01
RLSP	-1.679243	0,3247	β_2 tidak signifikan
KPP	-0.001600	0,2892	β_3 tidak signifikan

Hasil dari uji *t* pada tabel 6 adalah variabel tidak terikat yang menyebabkan pengaruh signifikan pada Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) Perempuan adalah UMK. Variabel Rata-rata Lama Sekolah Perempuan dan Kepadatan Penduduk Perkotaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada TPAK Perempuan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

Merujuk pada hasil uji regresi yang telah dilakukan, tertera bahwasanya UMK memiliki pengaruh positif dan signifikan pada TPAK perempuan di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian hasil tersebut selaras dengan hipotesis 1 dalam penelitian ini. Variabel UMK memiliki koefisien regresi sejumlah 0,0000129. Pola hubungan antara UMK dan Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) Perempuan linier-linier (lin-lin), sehingga ketika UMK naik 1rupiah maka TPAK Perempuan naik sebesar 0,0000129 persen. Sebaliknya apabila UMK turun 1rupiah maka TPAK Perempuan turun sejumlah 0,0000129 persen (*ceteris paribus*). Hasil riset ini linear dengan riset [Murianti et al, \(2022\)](#), di mana UMK menyebabkan pengaruh positif dan signifikan pada TPAK Perempuan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2010-2021. Temuan dari studi ini mengungkapkan bahwasanya peningkatan upah minimum kabupaten dapat mendorong peningkatan jumlah pekerja perempuan. Pada saat pemerintah meningkatkan serta mempertahankan tingkat upah akan memperkuat daya tarik upah, yang pada akhirnya akan

meningkatkan TPAK Perempuan. Dengan upah yang tinggi, pengorbanan waktu luang perempuan yang biasanya digunakan untuk mengurus rumah tangga akan terbayarkan. Temuan lain yang linear dengan riset ini yaitu studi dari [Murianti et al. \(2024\)](#) yang menemukan bahwa UMK menyebabkan pengaruh positif dan signifikan pada TPAK Perempuan di wilayah pesisir Provinsi Riau tahun 2018-2022 karena kenaikan upah akan menarik perempuan untuk ikut serta dalam pasar tenaga kerja. Penelitian lain lagi yang menunjang hasil penelitian ini adalah hasil riset [Norhikmah et al. \(2022\)](#) yang mengungkapkan bahwasanya UMK menyebabkan pengaruh signifikan pada TPAK Perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017-2020. Akan tetapi, hasil yang tidak serupa didapati oleh [Haryanti \(2022\)](#), di mana UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAK Perempuan di Rokan Hilir tahun 2012-2021, yang berarti dengan adanya kenaikan upah akan menyebabkan TPAK perempuan di Rokan Hilir akan menurun. Hal ini terjadi karena perbedaan struktur industri, kepatuhan terhadap kebijakan upah, dan dominasi sektor informal yang menyerap banyak tenaga kerja perempuan dengan upah di bawah minimum. Oleh karena itu, hasil positif pada penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan UMK di tingkat kabupaten dapat berfungsi sebagai insentif ekonomi utama bagi perempuan untuk memasuki pasar tenaga kerja, terutama di daerah dengan peluang kerja formal yang relatif tinggi.

Berdasarkan hasil uji regresi, tingkat pendidikan perempuan tidak menyebabkan pengaruh pada TPAK perempuan di Provinsi Jawa Tengah, dengan nilai koefisien sejumlah -1,679243 dan nilai signifikansi $0,32 > 0,1$. Sehingga hasil tersebut tidak linear dengan hipotesis 2 dalam penelitian ini. Dalam konteks teoritis, temuan ini dapat diuraikan melalui teori modal manusia (*human capital theory*) yang mengungkapkan bahwasanya pendidikan menaikkan tingkat keterampilan dan produktivitas individu, sehingga mampu memberikan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat pada pasar tenaga kerja. Namun, di beberapa daerah dengan peluang kerja yang terbatas yang sesuai dengan tingkat pendidikan atau di mana pasar tenaga kerja didominasi oleh sektor informal, peningkatan pendidikan tidak selalu disertai dengan peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan. Kondisi ini terjadi karena perempuan dengan pendidikan tinggi cenderung lebih selektif untuk memilih pekerjaan, menunggu posisi yang sesuai dengan kualifikasi mereka, atau memilih tidak bekerja jika pekerjaan yang tersedia dianggap tidak sebanding dengan tingkat pendidikan dan harapan gaji yang akan didapatkan. Selain itu, faktor sosial dan budaya seperti tanggung jawab rumah tangga juga dapat membatasi perempuan berpendidikan tinggi untuk bekerja, meskipun mereka memiliki kapasitas yang cukup memadai. Hasil ini linear dengan studi yang dilaksanakan oleh [Paulus et al. \(2024\)](#) yang mengungkapkan bahwasanya tingkat pendidikan tidak menyebabkan pengaruh pada TPAK perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2020 dan penelitian [Borgan Bonerri et al. \(2018\)](#) yang menemukan bahwasanya pendidikan tidak menyebabkan pengaruh pada TPAK di Kota Manado. Berbeda dengan temuan [Ariansyah & Satria \(2024\)](#) yang mengungkapkan bahwasanya tingkat pendidikan menyebabkan pengaruh pada TPAK Perempuan di Indonesia tahun 2018-2023. Hasil lain yang berbeda dari hasil studi ini adalah penelitian [Norhikmah et al. \(2022\)](#) yang mengungkapkan bahwasanya tingkat pendidikan menyebabkan pengaruh signifikan pada TPAK Perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017-2020. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan dan TPAK perempuan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, ketersediaan lapangan kerja yang sesuai, serta faktor sosial budaya di suatu wilayah. Dengan demikian, meskipun pendidikan merupakan aset penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, hal tersebut tidak cukup untuk berperan sebagai faktor utama yang memberikan dorongan pada perempuan untuk berpartisipasi di pasar tenaga kerja.

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel kepadatan penduduk perkotaan tidak menyebabkan pengaruh pada TPAK perempuan di Jawa Tengah, dengan nilai koefisien sejumlah -0,001600 dan nilai signifikansi $0,28 > 0,1$. Sehingga hasil tersebut tidak linear dengan hipotesis

3 dalam studi ini. Secara teoritis, menurut teori urbanisasi, wilayah perkotaan dengan kepadatan tinggi seharusnya menyediakan lebih banyak peluang kerja dan akses terhadap fasilitas ekonomi, sehingga berpotensi meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Akan tetapi, dalam realitanya peningkatan kepadatan penduduk tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan peluang kerja, terutama jika pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja baru. Kondisi ini dapat menyebabkan persaingan yang ketat di pasar tenaga kerja, sehingga perempuan tidak tertarik untuk memasuki pasar tenaga kerja. Selain itu, faktor sosial seperti beban ganda mengurus rumah tangga, budaya patriarki dan keterbatasan fasilitas pendukung seperti penitipan anak juga dapat menghambat partisipasi perempuan, meskipun mereka tinggal di daerah padat penduduk. Temuan ini linear dengan riset dari [Ramadhan & Eny \(2023\)](#) yang menunjukkan bahwa jumlah populasi tidak berpengaruh terhadap TPAK di Provinsi Banten tahun 2017-2021. Sebaliknya, temuan [Rahmawati \(2025\)](#) menyimpulkan bahwa jumlah penduduk menyebabkan pengaruh signifikan pada TPAK di Kabupaten Malang tahun 2009-2023. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwasanya pengaruh kepadatan penduduk terhadap partisipasi perempuan bergantung pada struktur ekonomi daerah, kapasitas penyerapan tenaga kerja, dan dukungan sosial yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi aktif di pasar tenaga kerja. Dengan demikian, kepadatan penduduk perkotaan tidak selalu menjadi faktor pendorong peningkatan TPAK perempuan apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi inklusif dan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung kesetaraan gender.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh upah minimum kabupaten (UMK), tingkat pendidikan perempuan, dan kepadatan penduduk perkotaan pada TPAK perempuan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023, kesimpulannya adalah: (1) UMK menyebabkan pengaruh positif dan signifikan pada TPAK perempuan di Jawa Tengah, hal ini berarti bahwa ketika UMK naik maka akan meningkatkan TPAK perempuan di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena pada saat pemerintah meningkatkan dan mempertahankan tingkat upah akan memperkuat daya tarik upah, yang pada akhirnya akan meningkatkan TPAK Perempuan. Dengan upah yang tinggi, pengorbanan waktu luang wanita yang biasanya digunakan untuk mengurus rumah tangga akan terbayarkan; (2) Tingkat pendidikan perempuan tidak menyebabkan pengaruh signifikan pada TPAK perempuan di Jawa Tengah. Hal ini dapat terjadi karena perempuan dengan pendidikan tinggi cenderung lebih selektif untuk memilih pekerjaan, menunggu posisi yang selaras dengan kualifikasi mereka, atau memilih tidak bekerja jika pekerjaan yang tersedia dianggap tidak sebanding dengan tingkat pendidikan dan harapan gaji yang akan didapatkan; (3) Kepadatan penduduk perkotaan tidak menyebabkan pengaruh signifikan pada TPAK perempuan di Jawa Tengah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan peningkatan kepadatan penduduk tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan peluang kerja, terutama jika pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja baru yang dapat menyebabkan persaingan yang ketat di pasar tenaga kerja, menjadikan wanita tidak tertarik untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja.

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan UMK di tingkat kabupaten sebagai insentif utama, diikuti dengan adanya program pendidikan dan penguatan infrastruktur sosial untuk mengatasi ketidakberpengaruhan variabel pendidikan dan kepadatan penduduk perkotaan. Hal tersebut dilakukan agar dapat berkontribusi pada peningkatan TPAK perempuan, pengurangan ketimpangan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Saran untuk meningkatkan TPAK perempuan perlu adanya peran

pemerintah dengan cara mengatasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, dengan memberikan akses yang setara pada pendidikan maupun lapangan pekerjaan atau kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti Kementerian Ketenagakerjaan atau BPS untuk menerapkan temuan ke dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah juga diharapkan dapat menghubungkan tingkat pendidikan yang tinggi agar selaras dengan kebutuhan industri. Saran bagi penelitian selanjutnya yaitu memperluas sampel ke tingkat nasional atau internasional, menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) untuk mendalami faktor sosial budaya melalui wawancara atau survei.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianita, H., Susilowati, D., & Anindita Putri Karisma, D. (2024). Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Jumlah Lapangan Kerja Melalui Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Gorontalo Development Review*, 7(1).
- Agung Bayu Windayana, I. B., & Darsana, I. B. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, UMK, Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten/Kota di Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(1), 57–72.
- Agustina. (2017). Peramalan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah UMMI*, 11(3).
- Ahmaddien, I., & Sa'dia, N. H. (2020). Pengaruh Kebijakan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia. *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(1).
- Al-Maisyaroh, R. N., & Nugraha, H. (2025). Apakah Ketimpangan Gender dan Faktor Sosial Ekonomi Makro Mempengaruhi Indeks Kebahagiaan Di Indonesia? Studi Di 34 Provinsi Indonesia pada Tahun 2017 dan 2021. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 25(1). <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.23259>
- Anggitaningrum, A., Iranto, D., & Nikensari, S. I. (2024). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 549–558. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-ekonomi-dan-bisnis/p549>
- Ariansyah, F., & Satria, D. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Wanita di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(4), 738–747. <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/login>
- Audilla, Y. F., & Rachmawati, L. (2025). Assessing the Influence of Minimum Wage, Education, and Poverty on the Labor Force Participation Rate: Evidence from Central Java Province. *Journal of Regional Economics Indonesia*. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/>

- Ayu Gusrifa, D., Nurlis Sholawati, D. M., Nadia, M., & Erlina Sari, N. (2025). Ketimpangan Gender Dalam Ketenagakerjaan dan Upaya Pemerataan Kesempatan Kerja di Kabupaten Ngawi. *Edunomia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*.
- Azizah Siregar, N., Ricardo, R., & Rembulan Nurdianto, N. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Sex Ratio dan Indeks Pembangunan Gender Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Sulawesi Selatan. *Desember, 2024(2)*, 43–57. <https://elegis.universitaspertamina.ac.id/index.php/ELEGIS/article/view>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pengertian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)*. <https://ketapangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkzIzI=/labor-force-participation-rate-tpak--by-age-group-and-gender--percent-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMY/Tingkat-Partisipasi-Angkatan-Kerja-Menurut-Jenis-Kelamin.Html>.
- Bayumi, M. R., Jaya, R. A., & Shalihah, B. M. (2022). Kontribusi Peran Perempuan dalam Membangun Perekonomian sebagai Penguatan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/jwcs.v2i2.14317>
- Borgan Bonerri, K., Novritha Walewangko, E., Tumangkeng, S. Y. L., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2018). Pengaruh Pendidikan dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01).
- Fathiyah, F., Syukri, M., Masnun, M., & Rahmadani, I. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jambi Tahun 2009-2023. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 90. <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i2.463>
- Haryanti, S. (2022). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita Di Rokan Hilir. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(4), 50–63.
- Hasian, S. V., & Harmadi, S. H. B. (2024). Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan: Studi Kasus Kepulauan Riau 2019-2023. *Indonesian Journal of Development Studies*, 3(1).
- Huzaimi, F. D., & Arisetyawan, K. (2023). Analisis Partisipasi Perempuan di Sektor Informal. *Journal Of Economics*, 3(3), 111–122. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent>
- Marbun, K. N. S., & Muchtolifah. (2023). Pengaruh Tenaga Kerja dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p320-327>

- Muhammad Azam, B. A. F. (2024). Pengaruh Modal Manusia dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *HATTA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2(1).
- Murialti, N., Fikry Hadi, M., Alagusri, J., & Bakaruddin. (2024). Analisis TPAK Perempuan di Wilayah Riau Pesisir Analysis of Women's TPAK in The Riau Coastal Region. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 14(2). <https://doi.org/10.37859/jae.v14i2.8059>
- Murialti, N., Hadi, M. F., & Asnawi, M. (2022). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Kabupaten Rokan Hilir (2010-2021). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(2), 229–237. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i2.4256>
- Nilasari, A., & Amelia, R. (2022). Pengaruh PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 2(2). <https://journal.inspirasi.or.id/index.php/nomicpedia>
- Norhikmah, P., Farid, F. M., & Lestia, A. S. (2022). Pemodelan Regresi Data Panel Pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan. *Journal of Statistics and Its Application*, 1(1).
- Novida Yenny, Putra, M., Anggraini, A., & Ramadhani Tanjung, A.-S. R. (2025). Analisis Perbandingan Sosial Ekonomi Desa dan Kota dalam Pembangunan Wilayah. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 103–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/wissen.v3i2.707>
- Nurhasanah, M., Solihah, M., & Panorama, M. (2025). Pengaruh Upah Minimum Kota Terhadap Kesejahteraan PekerjaSwasta di Kota Palembang Analisis Perspektif Ekonomi Makro Islam. *JESYA: Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 8(2), 1537–1545. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v8i2.2036>
- Panjaitan, D. V., Nuryartono, N., & Pasaribu, S. H. (2025). The Impact of Female Labor Force Participation on Regional Economic and Income Convergence. *Etikonomi*, 24(2), 547–568. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/etk.v24i2.41688>
- Paulus, U., Khalifah Fil'ardy, A., & Dwiyaniti, A. (2024). Kajian Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Daerah Pusat Perekonomian Kawasan Tengah Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Dinamika Sosial*, 3(1).
- Putri, A., Fardani, M., Ignasha, N., Farliana, N., & Chairunnisa, N. A. (2025). Pengaruh Gender Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pada Provinsi di Indonesia Tahun 2023. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 22(1).
- Putri, F. A., & Woyanti, N. (2025). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Upah, dan Jumlah Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 5(1), 12–20. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jeppupr>

- Rahmawati, O. F. (2025). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Malang. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*
- Ramadhan, B. A. (2023). Analisis Pengaruh Populasi Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Banten Tahun 2017-2021. *Primanomics: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(3). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ds>
- Rusydian, R. M., & Wijaya, R. S. (2024). Impact of Economic Growth, Minimum Wage, Labor Force Participation Rate, and Population Size on the Open Unemployment. *Journal of Business Management and Economic Development*, 2(03), 1186–1198. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v2i03.911>
- Shintiya, P., Alia Abdullah, M. N., & Rizaldi Mujayaputra, M. R. (2025). Warisan Patriaki: Hambatan Struktural Bagi Perempuan di Dunia Kerja. *SABANA (Sosiologi, Antropologi, Dan Bidaya Nusantara)*, 4(2), 171–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.55123/sabana.v4i2.5011>
- World Bank. (2024). *Labor force participation rate (% of population ages 15-64) (modeled ILO estimate)*. <https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.ACTI.FE.ZS?end=2024&locations=ID&start=2024>